

### KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat 10340 Gedung BPPT II lt 19-20 Telepon (021) 316-9804/9805, Faksimil (021) 3101728, 3102368 www.ristekdikti.go.id

### **SALINAN**

# KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR 30/E/KPT/2019

### TENTANG

### PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE VI TAHUN 2019

# DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,

### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasil akreditasi jurnal ilmiah yang ditetapkan oleh Tim Akreditasi Jurnal Ilmiah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada tanggal 8 Nopember 2019 dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah, perlu menetapkan Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode VI Tahun 2019;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode VI Tahun 2019;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

- 5. Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE VI TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode VI Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA: Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun mulai dari nomor yang ditetapkan dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA: Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat mengajukan kembali kenaikan peringkat setelah menerbitkan minimal 1 (satu) nomor penerbitan.

KEEMPAT : Setiap jurnal ilmiah wajib mencantumkan masa berlaku akreditasi dengan menuliskan tanggal penetapan dan tanggal akhir masa berlaku akreditasi.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah, maka status akreditasi jurnal ilmiah yang bersangkutan dapat dicabut atau diturunkan.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Nopember 2019

DIREKTUR JENDERAL

PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN,

TTD.

MUHAMMAD DIMYATI NIP 195912171984041001

Salinan sesuai dengan aslinya, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi,

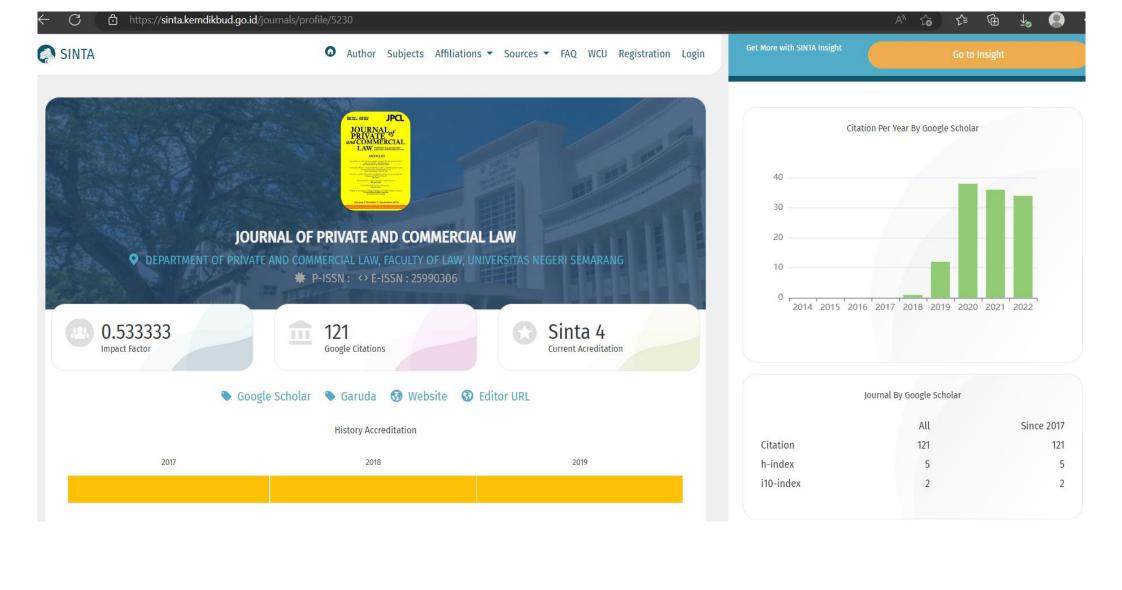
Syarip Hidayat NIP 197306101997031004 SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 30/E/KPT/2019
TENTANG
PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH
PERIODE VI TAHUN 2019

### PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE VI TAHUN 2019

Peringkat	No	Nama Jurnal	E-ISSN	Penerbit	Keterangan
1	1	Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	25027883	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada	Reakreditasi naik peringkat dari peringkat 2 ke 1 mulai Volume 23 Nomor 1 Tahun 2019
2	1	Adbispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan	25499912	Departemen Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran.	Reakreditasi naik peringkat dari peringkat 3 ke 2 mulai Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018
	2	Agrointek: Jurnal Teknologi Industri Pertanian	25275410	Teknologi Industri Pertanian Universitas Trunojoyo Madura	Reakreditasi naik peringkat dari peringkat 3 ke 2 mulai Volume 13 Nomor 2 Tahun 2019
	3	Al Ibtida: Jurnal Pendidikan Guru MI	25277227	Jurusan PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan Perkumpulan Dosen PGMI Indonesia	Reakreditasi naik peringkat dari peringkat 3 ke 2 mulai Volume 6 Nomor 1 Tahun 2019
	4	Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial	24423084	Asosiasi Pengkaji Hukum Islam (APHI) bekerjasama dengan Fakultas Syariah IAIN Madura	Reakreditasi tetap di peringkat 2 mulai Volume 14 Nomor 1 Tahun 2019
	5	Buletin Ilmiah Marina : Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	25412930	Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	Reakreditasi naik peringkat dari peringkat 3 ke 2 mulai Volume 5 Nomor 1 Tahun 2019

	101	Vision : Journal of Language and Foreign Language Learning	25414399	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang	Reakreditasi tetap di peringkat mulai Volume 8 Nomor 1 Tahun 2019
	102	Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat	25990012	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Serang Raya	Usulan baru mulai Volume 1 Nomor 2 Tahun 2017
	103	ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf	24775347	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus	Usulan baru mulai Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017
4	1	(IJAI) Indonesian Journal of Applied Informatics	25985981	Prodi Diploma III Teknik Informatika Universitas Sebelas Maret	Usulan baru mulai Volume 2 Nomor 1 Tahun 2017
	2	ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)	26150409	Stiesa Press	Usulan baru mulai Volume 2 Nomor 1 Tahun 2018
	3	AdMathEdu: Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Ilmu Matematika dan Matematika Terapan	26567040	Universitas Ahmad Dahlan	Usulan baru mulai Volume 7 Nomor 2 Tahun 2017
	4	AGRITEKNO, Jurnal Teknologi Pertanian	26209721	Universitas Pattimura	Usulan baru mulai Volume 6 Nomor 2 Tahun 2017
	5	Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat	2461095 X	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Insitut Pertanian Bogor	Reakreditasi tetap di peringkat 4 mulai Volume 5 Nomor 2 Tahun 2019
	6	Agroland Jurnal Ilmu- Ilmu Pertanian	24077607	Fakultas Pertanian Universitas Tadulako	Usulan baru mulai Volume 24 Nomor 3 Tahun 2017
	7	Akademika Jurnal Teknologi Pendidikan	26559633	Magister Teknologi Pendidikan Universitas Islam As-Syafi'iyah	Usulan baru mulai Volume 6 Nomor 2 Tahun 2017
	8	AKSARA: Jurnal Bahasa dan Sastra	26203928	Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Universitas Lampung	Usulan baru mulai Volume 18 Nomor 2 Tahun 2017

66	JMEMME (JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING, MANUFACTUR ES, MATERIALS AND ENERGY)	25496239	Universitas Medan Area	Reakreditasi tetap di peringkat 4 mulai Volume 3 Nomor 1 Tahun 2018
67	Joged: Jurnal Seni Tari	26553171	Jurusan Tari, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta	Usulan baru mulai Volume 8 Nomor 2 Tahun 2017
68	JOINS (Journal Of information System)	25280236	Prodi Sistem Informasi Universitas Dian Nuswantoro	Usulan baru mulai Volume 2 Nomor 2 Tahun 2017
69	JOP (Journal Online of Physics)	25022016	Prodi Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi	Usulan baru mulai Volume 3 Nomor 1 Tahun 2017
70	JOSSAE (Journal of Sport Science and Education)	25484699	Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Surabaya	Reakreditasi tetap di peringkat 4 mulai Volume 4 Nomor 1 Tahun 2019
71	Journal of Education Technology	25498290	Universitas Pendidikan Ganesha	Usulan baru mulai Volume 1 Nomor 2 Tahun 2017
72	Journal of Innovation and Applied Technology	24777951	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Brawijaya	Usulan baru mulai Volume 3 Nomor 2 Tahun 2017
73	Journal of Issues in Midwifery	25496581	Universitas Brawijaya	Usulan baru mulai Volume 1 Nomor 3 Tahun 2017
74	Journal of Oral Health Care	26230526	Poltekkes Kemenkes Yogyakarta	Usulan baru mulai Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017
75	Journal of Private and Commercial Law	25990306	Department of Private and Commercial Law, Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang	Usulan baru mulai Volume 1 Nomor 1 Tahun 2017
76	JP3M (Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pengajaran Matematika)	25812807	Program Studi Pendidikan Matematika FKIP- Universitas Siliwangi	Usulan baru mulai Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018
77	JPAI (Journal of Psychology and Instruction)	25494589	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Pendidikan Ganesha	Usulan baru mulai Volume 1 Nomor 1 Tahun 2017



Home / Vol 6, No 2 (2022)

### ABOUT THE JOURNAL

FOCUS AND SCOPE

EDITORIAL BOARDS

JOURNAL POLICY

INDEXING & ABSTRACTING

OPEN ACCESS POLICY

PUBLISHING SYSTEM

JOURNAL HISTORY

CONTACT

FOR AUTHORS

AUTHOR GUIDELINES

ONLINE SUBMISSION

AUTHOR FEES

PUBLICATION ETHICS

COPYRIGHT

COPYRIGHT TRANSFER FORM

DECLARATION OF ORGINALITY

### Journal of Private and Commercial Law

About Current Issue Focus and Scope Submission Contact

Journal of Private and Commercial Law is a scientific journal for the fields of Private and Commercial Law and allied sciences with Private and Commercial Law. Journal of Private and Commercial Law was published by Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang. Journal of Private and Commercial Law receives articles based on research results and thoughts in Private and Commercial Law field, you can find our scope in FOCUS AND SCOPE. Journal of Private and Commercial Law accepts writing in English. Journal of Private and Commercial Law is published twice a year (Semi-Annually) in May and November. The article will go through a peer-review process and ensuring a blind peer-review process. Based on the review will determine whether the manuscript will be published or not.

Journal of Private and Commercial Law is a media to bring together the results of thought and research by academics and practitioners in selected legal fields of study covering Private Law, Commercial Law, Intellectual Property, Economic Law, Business Law, Adat Law, Anthropology Law, Sharia Law, Insurance Law, Banking Law,

Consumer Protection Law, and cognate in other Private Law fields. The manuscript that has been received and is ready to be published will be published online (OJS) and the printed version.

Indexed by:

- DOAJ
- Google Scholar





### **Board of Editors**

- » Yuli Prasetyo Adhi, (Scopus ID: 57203017542) Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia
- » Ayup Suran Ningsih, [SCOPUS ID 57215580621] Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Reviewer

Archive

**→** Login

Register

- » Chrisna Bagus Edhita Praja, (Scopus ID: 57211218445) Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia
- » Widiyanto Widiyanto, [Scopus ID: 57201671173] Universitas Terbuka, Indonesia
- » Waspiah Waspiah, (Scopus ID: 57218096155) Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

### **Advisory Editors**

» Thomas Schmidt-Lux, Universität Leipzig, Germany

### Journal Support

» Mirza Aqiel Sajida, Universitas Negeri Semarang, Indonesia



PUBLISHING SYSTEM

JOURNAL HISTORY CONTACT

FOR AUTHORS

AUTHOR GUIDELINES

ONLINE SUBMISSION

AUTHOR FEES PUBLICATION ETHICS

COPYRIGHT

COPYRIGHT TRANSFER FORM



About

**Editorial Team** 

Reviewer

Archive → Login

♣ Register

### ABOUT THE JOURNAL

FOCUS AND SCOPE

EDITORIAL BOARDS

JOURNAL POLICY

INDEXING & ABSTRACTING

OPEN ACCESS POLICY

PUBLISHING SYSTEM

JOURNAL HISTORY

CONTACT

### FOR AUTHORS

AUTHOR GUIDELINES

ONLINE SUBMISSION

AUTHOR FEES

PUBLICATION ETHICS

COPYRIGHT

COPYRIGHT TRANSFER FORM

DECLARATION OF ORGINALITY



### Vol 5, No 2 (2021)

### November

DOI: https://doi.org/10.15294/jpcl.v5i2

### **Table of Contents**

### Articles

Implementation Of Legal Protection On Royalty Management Of Government Regulation Number 56 Of 2021 Febri Noor Hediati	(PDF) 95 - 105
Utilization Of Social Media As A Strategy For Business Actors In Dealing With The Covid-19 Pandemic Pujiono - Pujiono, Dewi - Sulistianingsih, Rini - Fidiyani	PDF 106 - 119
Consumer Protection Law: The Case Study Of Grabtoko Company In Indonesian E-Commerce Transactions Felix Pratama Tjipto, Jason Pratama Ong, Marshal Ramadhan Sulistio, Tri Harnowo	PDF 120 - 140
Legal Uncertainty Regarding Abuse of Authority That is Harming State Finance in Indonesia Judith Sukmaningtyas, Nabitatus Sa'adah	PDF 141 - 154
Law Enforcement In The Field Of Music In The Spotify Application Program  Bagus Rahmanda, Yuli Prasetyo Adhi, Kornelius Benuf	PDF 155 - 166
Comparative Study Of Alternative Settlements In Indonesia And Timor Leste Salsabila Fakhriyyah Ar Raidah	PDF 167 - 177

 $\mathbf{Q}$ 

### **JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW**

https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl



# Law Enforcement In The Field Of Music In The Spotify Application Program

### **Bagus Rahmanda**

Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia

Bagus.rahmanda@live.undip.ac.id

### Yuli Prasetyo Adhi

Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia <u>vuliprasetvoadhi@gmail.com</u>

### **Kornelius Benuf**

Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia korneliusbenuf@gmail.com

Submitted: August 23, 2021 Revised: September 10, 2021 Accepted: September 11, 2021

### **ABSTRACT**

Music and songs are one of the areas of Intellectual Property Rights which are protected in Article 58 letter (d) of UU Number 28 of 2014 about Copyright, namely Copyright Protection for Song or music creations with or without text. In this digital era, there are many ways for us to get the music we want through various platforms on the internet such as Youtube, Joox, Spotify, and others. Because the means to get music are getting easier now, there are more and more copyright violations against music, ranging from piracy to plagiarism. This study aims to discuss how the Copyright law regulates copyright protection in the field of music on the internet and also how the Spotify music service platform protects copyright. The research method used is a normative research method; the data analyzed is secondary legal data consisting of primary legal materials, namely Copyright Law and Secondary Law materials, namely literature related to research problems. Based on the results of the study, it is known that Spotify as one of the world's famous song streaming applications has the exclusive right as a copyright licensee to exercise exclusive rights as regulated in Article 9 of the Copyright Law. Spotify as a streaming service provider must of course have a license for the music or songs provided in the application through a license agreement with the licensor.

Keywords: Copyright; Music; Spotify Application; law enforcement



https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl



## Consumer Protection Law: The Case Study Of Grabtoko Company In Indonesian E-Commerce Transactions

### Felix Pratama Tjipto

International Business Law Program, Universitas Prasetiya Mulya, Indonesia

Felix.tjipto@student.pmsbe.ac.id

### Jason Pratama Ong

International Business Law Program, Universitas Prasetiya Mulya, Indonesia

Iason.ong@student.pmsbe.ac.id

### Marshal Ramadhan Sulistio

International Business Law Program, Universitas Prasetiya Mulya, Indonesia

marshal.ramadhan@student.pmsbe.ac.id

#### Tri Harnowo

International Business Law Program, Universitas Prasetiya Mulya, Indonesia <a href="mailto:tri.harnowo@pmbs.ac.id">tri.harnowo@pmbs.ac.id</a>

Submitted: September 25, 2021 Revised: October 26, 2021 Accepted: October 27, 2021

### **ABSTRACT**

Technology innovation is steadily increasing its capacity in helping human activities, one of which is through digital transactions. The increased use of technology, however, could potentially create legal loopholes which may violate consumer's rights in online transactions like the recently happened GrabToko case. The method used in this article is a normative analysis thorough literature review with statutory and comparative approach related to Indonesian customer protection law, with the reference of previous articles, seeing the increasing usage of digital transactions. This article aims to provide an explanation regarding the advantages and the disadvantages of existing regulations and what needs to be improved related to frauds in the case of GrabToko. Furthermore, it will also be discussed about the legal responsibility of the consumer dispute settlement organizations. The results of this article shows that there are still needs of improvements since the system has its own advantages and disadvantages, especially regarding fraud and administration systems that need to be updated in corresponding law and the development in the aspect consumer protection law.

Keywords: Consumer Protection Law; Consumer Dispute Settlement; Consumer Rights

# Law Enforcement In The Field Of Music In The Spotify Application

by Bagus Rahmanda

**Submission date:** 26-Dec-2022 01:56PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1986649675

File name: 31702-84452-1-PB.pdf (160.92K)

Word count: 4764

Character count: 24574





https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl

# Law Enforcement In The Field Of Music In The Spotify Application Program

### Bagus Rahmanda

Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia

Bagus.rahmanda@live.undip.ac.id

### Yuli Prasetyo Adhi

Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia yuliprasetyoadhi@gmail.com

### **Kornelius Benuf**

Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia korneliusbenuf@gmail.com

Submitted: August 23, 2021 Revised: September 10, 2021 Accepted: September 11, 2021

### ABSTRACT

Music and songs are one of the areas of Intellectual Property Rights which are protected in Article 58 letter (d) of UU Number 28 of 2014 about Copyright, namely Copyright Protection for Song or music creations with or without text. In this digital era, there are many ways for us to get the music we want through various platforms on the internet such as Youtube, Joox, Spotify, and others. Because the means to get music are getting easier now, there are more and more copyright violations against music, ranging from piracy to plagiarism. This study aims to discuss how the Copyright law regulates copyright protection in the field of music on the internet and also how the Spotify music service platform protects copyright. The research method used is a normative research method; the data analyzed is secondary legal data consisting of primary legal materials, namely Copyright Law and Secondary Law materials, namely literature related to research problems. Based on the results of the study, it is known that Spotify as one of the world's famous song streaming applications has the exclusive right as a copyright licensee to exercise exclusive rights as regulated in Article 9 of the Copyright Law. Spotify as a streaming service provider must of course have a license for the music or songs provided in the application through a license agreement with the licensor.

Keywords: Copyright; Music; Spotify Application; law enforcement

Available Online at: https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl/155





### INTRODUCTION

Music or song is a series of sounds arranged in such a way that in it there are songs, rhythms, harmony, and tones of a sound that comes from various tools that can produce musical rhythms. For some people, music is a necessity that accompanies their days, whether it's while studying, eating, traveling, exercising and even sleeping. There are also many artists around the world who create music that suits the various musical tastes of the wider community, even every year there are many music artists who regenerate in each genre of music<sup>1</sup>. Music has a power that can affect human life. Music as a part of culture cannot be separated from the values that live in the society concerned. Through this music, we can also learn values, both socio-cultural, moral, spiritual, religious, as well as human interaction in the life of a society.

In the old times, our way to get music was by coming directly to music concerts or buying LPs or music CDs in stores which seemed expensive, difficult to get, and also took up space to store LPs or CDs of the music. On the other hand, because the physical goods are clearly visible, copyright protection for music is relatively easy compared to nowadays where protection is quite difficult because the way to get music is also easy because there are so many ways to get music<sup>2</sup>. It is difficult to carry out legal protection of musical works in the current era, because it is influenced by the power of technology. Technology has changed musical works into works that have many derivatives, and makes it very easy for everyone to get musical works freely by violating copyright.

Internet or cyberspace, has presented a new reality of life to the community, namely changing distance and time into something that is not limited. With the internet, everyone can do various activities which in the real world are difficult to do because they are separated by distance. Because of the internet, the distance is not an obstacle anymore. A reality that is very far from where we are can be presented in front of us with the internet media. We can

Lutfi Ulinnuha, 'Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia', JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW, 1.1 (2017), 85–110.

Hasbir Paserangi, 'Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer Di Indonesia', Jurnal Fakultas Hukum UII, 18.1 (2011), 20–35.





do business transactions, chat, shop, study and various other activities just like in real life<sup>3</sup>. In addition to bringing many benefits, sometimes the internet also has negative impacts such as the spread of computer viruses through the internet network, criminal acts committed by the community such as online gambling, pornography which can be accessed freely by the public and also to the field of Intellectual Property Rights, especially song copyrights which can be easily downloaded through the internet<sup>4</sup>.

Song is one of the areas of Intellectual Property Rights which are protected in Article 58 letter (d) of UU Number 28 of 2014 about Copyright, namely Copyright Protection for Song or music creations with or without text. As protected by UU No. 28 of 2014 concerning Copyright, songwriters have the right to moral rights as well as economic rights to their creations. Moral rights are rights that are automatically obtained by a creator of his creation. While this economic right is needed as a form of appreciation or value for the creativity of his creation in the form of a song that can be enjoyed by the public or people when listening to it. This means that the creator has the right to moral rights and economic rights from songs that are enjoyed by the community.

In this digital era, there are many ways for us to get the music we want, from listening to music at music concerts directly, listening to it on various platforms on the internet such as Youtube, Joox, Spotify, and others. Because the means to get music are getting easier, there are also more violations in the field of copyright against music, ranging from piracy to plagiarism. Therefore, the protection of copyright in the field of music really needs to be reviewed.

A creation made in digital form is indeed very easy to duplicate and the result of the act is also almost indistinguishable from the original. In addition, now people can make modifications or changes to the results of the copy which can then be distributed throughout the world at almost no cost. On the one hand, for almost everyone this certainly makes it very easy to violate the copyrights of others on a very large scale, but on the other hand it is

Habi Kusno, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhodap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet". Jurnal Fiat Justisia. Vol. 10 No. 3. 201, page 490.

<sup>\*</sup> Ibid

<sup>5</sup> Ibid





not easy for creators as copyright owners to be able to find out if an infringement has occurred or to take legal action.

This article will discuss how the law regulates copyright protection in the field of music on the internet and also how the Spotify music service platform protects copyright. The occurrence of acts of copyright infringement on a created song that is carried out at the present time, because it is easy for us to access the internet to get a created song by all means, ranging from legal methods according to legislation and illegal ways such as piracy of songs created and others. Therefore, it is necessary to discuss further on how a song service provider platform on the internet protects the copyright of the songs created on the platform. The focus of this study is on how copyright infringement by Spotify service providers is and how law enforcement is for Spotify service providers.

### RESEARCH METHODE

The method used in this study is a normative legal research, namely library law research which refers to the legal norms contained in the legislation. This approach is carried out by reviewing all laws and regulations related to the legal issue being handled. In legal research, there are several approaches, with the approach of getting information from various aspects regarding legal issues that will be sought for answers.

### RESULTS AND DISCUSSIONS

### Copyright Infringement by Spotify Service Providers

Basically, copyright is a right owned by legal subjects over their creations. The creations can be in the fields of science, art, and literature. Especially in artistic works which include song and/or music copyrights, there are two kinds of rights, namely moral rights and economic rights. Regarding economic rights, they are further divided into 2 (two) namely

Soerjono Soekamto and Sri Mamudji, (2006), Penditian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Press, page 23.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, page 93

Habi Kusno, 'Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet', Fiat Justitia, 10.3 (2016), 489–502.





mechanical rights relating to the reproduction of songs and/or music on cassettes, compact disks, laser disks, etc., and performing rights which are related to the activity of playing a copyrighted song and/or music, for example singing a song or playing a cassette in a public place for commercial purposes.

Spotify is a digital music, podcast, and video service that gives you access to millions of songs and other content from creators around the world. One well-known music streaming company, Spotify, was sued by Wixen Music Publishing in 2018 for allegedly using songs without a license agreement and compensation to the publisher of the music. It does not have a direct license or mandatory license from Wixen that allows the company to reproduce and distribute the songs. This can be said as a form of violation of performing rights activities aimed at announcing commercial purposes, which will definitely bring benefits to the company owner.

Authentically, UU No. 28 of 2014 has formulated that what is meant by announcement is reading, broadcasting, exhibiting a work using any means, whether electronic or non-electronic or doing so in any way so that a work can be read, heard, or seen by others. From a civil perspective, performing rights can be viewed from the perspective of granting licenses to users in the form of licensing agreements. This is in line with copyright as an exclusive right and economic right, where the creator or copyright holder has the right to give permission to other parties to publish their creations and granting such permission cannot be separated from the problem of profits from the use of their copyright. The granting of permission from the creator or copyright holder to another person is called a license. License comes from the Latin, namely licentia. In this language, a license can be interpreted as a form of permit that is used in certain cases and is contained in a certain deed based on an agreement which basically contains the agreement and the rights and obligations of both parties.

Licensing is a form of granting permission to utilize an intellectual property right, which can be granted by the licensor to the licensee so that the licensee can carry out a form

<sup>9</sup> Roeslan Salch, Seluk Beluk Praktis Lisensi, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, page 1





of business activity, either in the form of technology or knowledge that can be used to produce, produce, sell or market certain goods, by using the licensed intellectual property

form of royalty payments known as license fees10.

From the point of view of the aspect of criminal law, song and/or music copyright regarding performing rights is the use of songs and/or music without permission from the author and/or the legal copyright holder. Criminal provisions relating to copyright infringement of songs and/or music in the field of performing rights are contained in Article 113 paragraph (1) to paragraph (3) of UU no. 28 of 2014 about Copyright.

rights. For this purpose, the licensee is required to provide a performance contract in the

The undeniable fact is that the creator has enriched the user community through his creative work, so that the creator has a fundamental right to receive compensation commensurate with the value of his contribution. So in that case, one of the obligations of the licensee for the announcement of songs and/or music is payment of a sum of money to the licensor which is commonly referred to as a royalty (license fee). Royalties are a form of payment made to copyright owners or performers for not using their ownership. In relation to the payment of royalties as a consequence of copyright in songs and/or music as an exclusive right, it can also be argued that this is an embodiment of the economic rights contained in copyright, namely the right to obtain economic benefits from the creation.

Quoted from Spotify official website, the Spotify Copyright Policy section explains that "Spotify respects intellectual property rights and expects its users to do the same. If you are the copyright owner or agent, and you believe that any of the copyrighted material directly available on Spotify violates your copyright, please let us know" 12. Spotify itself does provide a means of complaint both online through the form they include on their official website page, as well as the address where a complaint can be filed if there is an alleged violation that occurs in their streaming application. However, Spotify does not clearly

Gunawan Widjaja, Seri Hukur 13 snis, Lisensi, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, page 10-11

Hendra Tanu Atmadj. 2003. Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu di Indonesia, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 33 No. 2, page 293.

Spotify.com, Legal Copyright Policy





explain what steps they will take to resolve a matter if a violation is indeed justified other than terminating the account of the user who is suspected of committing the violation.

In fact, it was Spotify itself that committed the offense and was reluctant to respond to the allegations levelled against them<sup>13</sup>, but was willing to pay damages to settle a proposed joint lawsuit alleging it did not pay royalties for some of the songs it provided to users. The occurrence of copyright infringement in music streaming applications is indeed increasingly difficult to detect in the online world distribution flow, then it has an obligation to fulfil and comply with the requirements of the applicable laws and regulations, namely ensuring that there is legal security for all related subjects as a service provider.

Spotify as a streaming service provider must of course have a license for the music or songs they provide in the application as previously explained through a license agreement with the licensor. Under the law, it will be the licensee who will have its own rights and obligations after the agreement is concluded. Obligations that must be adhered to for the licensee or in this case the Spotify company, include:

- 1. The licensee is obliged to pay a certain amount of royalty money. Paying royalties is a top priority obligation of the licensee. What is often questioned is how much and how the royalty payments should be made. There are several ways of paying royalties that are often used in the practice of licensing agreements, including: (i) Lump sum payment, (ii) Instalment payment, (iii) fixed annual payment, (iv) running royalties: (a) percentage basis, (b) fixed sum per unit sold, (v) minimum royalty payment, (vi) maximum royalty payment, (vii) payment paid up clause. Each method uses a technical calculation formula. Other issues related to royalties are (a) from when the royalties have to be paid, (b) whether the royalty payments are free from tax payments, (c) whether late payments of royalties will be subject to interest and/or sanctions.
- The licensee is basically burdened with the obligation to use the rights obtained from the license agreement. Except in certain cases, for example (i) if the licensee agrees to pay a

Reuters. 2018. "Spotify Dituntut \$1,6 Miliar atas Pelanggaran Hak Cipta" https://www.voaindonesia.com/a/spotify-dituntut-1-koma-6-miliar-dolar-atas-pelanggaran-hak-cipta/4190189.html (June, 24, 2021)





https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl

certain minimum amount of royalties regardless of whether he will exercise his rights or not, (ii) in the case of a non-exclusive license agreement, such obligations are not required of the licensee.

3. The licensee is also obliged to (a) not to disclaim the licensed rights, (b) the obligation not to compete, (c) the obligation to maintain confidentiality, (d) the obligation to maintain the quality of the product, and (e) the obligation to fulfil and comply with the requirements. - the requirements of the applicable laws and regulations<sup>14</sup>.

After the emergence of cases of alleged violations of using thousands of songs without a license and compensation to music publishers, unfortunately Spotify has not updated the protocol and preventive measures that can be applied if this happens again other than confirming that they will be more thorough in investigating related cases. Learning from cases of license violations in the past, the violations committed certainly do not need to occur in the online music streaming industry and should not happen again in the future if the existing regulations are implemented strictly and there are additional regulations that reduce loopholes in the online service provider industry.

### Spotify Service Provider Law Enforcement System

The Indonesian government has accommodated everyone who wants to protect their creations, especially in the field of copyright as stipulated in the laws and regulations, namely UU no. 28 of 2014 about Copyright (hereinafter referred to as the Copyright Law). As regulated in Article 40 paragraph (1) of the Copyright Law, a person's creations that are protected can be in the form of science, art, and literature such as books, pamphlets, lectures, speeches, songs, music instruments, paintings, photography, interpretations, adaptations, computer programs, and several other works.

Legal protection for copyrights, especially musical works or songs, is given to the creator. In Article 1 point 2 of the Copyright Law it is explained that the creator is a person or several people who individually or jointly produce a work that is unique and personal.

Sumantoro, Masalah Pengaturan Alih Teknologi, Edisi Pertama, Cetakan I, Penerbit Alumni, Bandung, 1993 page 69-70





According to Article 1 point 4, those who can become copyright holders are the creators as copyright owners, other parties who receive the rights legally from the creators, or other parties who further receive rights from the parties who receive the rights legally. The creator of the song or music can register his creation to the Directorate of Copyright and Industrial Design in accordance with the provisions of Article 64 paragraph (1) of the Copyright Law. The recording of the work to obtain this copyright is not mandatory, because the principle of this copyright itself arises automatically when the work is announced or manifested in a tangible form (automatic protection).

Nowadays, we can listen to music or songs from any creator wherever and whenever we want. This can happen because of the development of a new technology that we call streaming. Streaming is the sending of data in the form of video or audio content to electronic devices such as computers or mobile phones through constant internet transmission. In streaming activities, users have an alternative to be able to watch live or listen directly to streaming shows and services to watch later by downloading the file first<sup>15</sup>. Currently, one of the most widely known song streaming applications in the community is Spotify.

When streaming, there is a broadcasting activity of a work using electronic media (gadgets and personal computers) so that other people can listen to the work of the song, this is included in the form of announcement of copyrighted works as stipulated in Article 1 number 11 of the Copyright Law, which reads:

"Announcement is the reading, broadcasting, exhibition, of a work by using any means, whether electronic or non-electronic, or doing so in any way so that a work can be read, heard, or seen by others."

Article 9 of the Copyright Law states that the creator or copyright holder has the economic right to publish the work, copy the work, and others, one of which is the right to announce the work. The song streaming system on Spotify is an exclusive right held by the copyright or copyright holder. Because of these exclusive rights, other people cannot announce copyrighted works without permission from the creator or copyright holder.

Austerberry and David, The Technology of Video and Audio Streaming. (Burlington: Focal Press, 2005). page 134





In the Spotify application, users can upload song works into the application. After uploading, there will be a legal relationship between the Spotify service provider and the uploader which will be determined in an agreement. The agreement is the Spotify Terms and Agreement which basically explains that if the user does not agree to the things stipulated in the Terms and Agreement, the user may not use the Spotify streaming application service. This means that the uploader has agreed to the related matters stipulated in the Terms and Agreement.

The legal relationship between the user who uploads the song containing the copyright and the creator and/or copyright holder and/or heir whose rights have been violated is a bond that arises because of the law; this is in accordance with article 1352 of the Civil Code. Works that have been uploaded to Spotify already contain copyright in it where if there is such a thing is detrimental to the creator and/or copyright holder and/or his heirs. Article 10 Copyright states:

"The manager of a trading place is prohibited from allowing the sale and/or reproduction of goods resulting from infringement of Copyright and/or Related Rights in the trading place they manage."

So, the legal relationship above is a bond that arises from the legislation in Article 1352 BW.

In an effort to overcome the occurrence of copyright infringement, dispute resolution through alternatives is prioritized. As regulated in Article 95 paragraph 1 of the Copyright Law, which reads "Copyright dispute resolution can be done through alternative dispute resolution, arbitration, or court". Settlement of disputes in alternative settlements is based on good faith to the exclusion of litigation in the district court. The dispute resolution is carried out by holding a direct meeting between the disputing parties. The scope of arbitration and alternative dispute resolution is also regulated in Article 5 Paragraph 1 of the Law on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, namely:

 Disputes that can be resolved through arbitration are only disputes in the trade sector and regarding rights which according to laws and regulations are fully controlled by the disputing parties.



https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl



(2) Disputes that cannot be resolved through arbitration are disputes which according to the laws and regulations cannot be reconciled.

According to the explanation of Article 66 letter B Arbitration and Alternative Dispute Resolution, what is meant by the scope of trade law are activities in the fields of commerce, banking, finance, investment, industry, and intellectual property rights<sup>16</sup>.

The creator or copyright holder, who knows that his copyright has been infringed, can take legal action. Liability according to Peter Mahmud Marzuki refers to the position of a person or legal entity that is deemed to have to pay a form of compensation or compensation for having committed an unlawful act that causes harm to the other person or legal entity 17. In the event of a loss due to copyright infringement, the creator or copyright holder has the right to file a civil lawsuit, as well as criminally prosecute as stated in Article 105 of the Copyright Law. Another thing that needs to be considered is the provision in Article 120 of the Copyright Law which states that a criminal act in the copyright law is a complaint offense. Where the complaint offense is clearly stated, this crime can only be prosecuted if there is a complaint from the interested party. In this case, it is the creator, copyright holder, and/or their heirs.

### CONCLUSION

Spotify as a streaming service provider must of course have a license for the music or songs they provide in the application as previously explained through a license agreement with the licensor. However, in 2018, it was sued for not having a direct license from Wixen that would allow the company to reproduce and distribute the songs. This can be said as a form of violation of performing rights activities aimed at announcing commercial purposes, which will definitely bring benefits to the company owner.

The Indonesian government has accommodated everyone who wants to protect their creations, especially in the field of copyright as stipulated in the laws and regulations, namely

Explanation Article 66 Letter B of Law No 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute 14 olution.

Paulus Aluk Fajar Dwi Santi, "Mempertanyakan Konsepsi Tanggung gugat". 2016. Jurnal Binus University



https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl



UU no. 28 of 2014 about Copyright. *Spotify* as one of the world's famous song streaming applications has the exclusive right as a copyright licensee to exercise exclusive rights as regulated in Article 9 of the Copyright Law.

### BIBLIOGRAPHY

### Articles, books and journals

- Atamdja, H. (2003). Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu Di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 293.
- Austerberry, & David. (2005). The Technology of Video and Audio Streaming. Focal Press (p. 134). Burlington.
- Hasbir Paserangi, 'Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer Di Indonesia', Jurnal Fakultas Hukum UII, 18.1 (2011), 20–35.
- Kusno, H. (2016). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet. Jurnal Fiat Justitia Vol. 10 No. 3, 490.
- Lutfi Ulinnuha, 'Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia', JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW, 1.1 (2017), 85–110.
- Reuters. (2018, Januari 3). Spotify Dituntut 1,6 Miliar Dollar atas Pelanggaran Hak Cipta.

  Retrieved Maret 16, 2021, from Voa Indonesia:
  https://www.voaindonesia.com/a/spotify-dituntut-1-koma-6-miliar-dolar-atas-pelanggaran-hak-cipta/4190189.html
- Saleh, R. Seluk Beluk Praktis Lisensi. Jakarta: Sinar Grafika, 1991
- Santo, P. Mempertanyakan Konsepsi Tanggung Gugat. Jurnal Binus University, 2016
- Sumantoro. Masalah Pengaturan Alih Teknologi. Bandung: Penerbit Alumni, 1993
- Widjaja, G. Seri Hukum Bisnis. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003.

### Laws and regulations

- Republic of Indonesia. UU Number 28 of 2014 about Copyright. State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 266.
- Republic of Indonesia. UU Number 30 of 1999 about Arbitration and Alternative Dispute Resolution. State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 138.

# Law Enforcement In The Field Of Music In The Spotify Application

Application				
ORIGINALITY REPORT				
SIMILA	0% ARITY INDEX	9% INTERNET SOURCES	7% PUBLICATIONS	3% STUDENT PAPERS
PRIMAR	Y SOURCES			
1	zenodo. Internet Source			2%
2	Submitte Surabay Student Paper		s 17 Agustus ´	<b>1</b> 945 <b>1</b> %
3	akadem Internet Source	ik.nommensen-	id.org	1 %
4	nopr.nis	cair.res.in		1 %
Submitted to Leiden University Student Paper  1 %				
6	ejournal Internet Source	.warmadewa.id		1 %
7	"Copyrig Tradema Number	Theresia Suriad tht Legal Protec ark (Analysis on 52k/Pdt.Sus-Hk n Hukum, 2022	tion for Portra Cassation Dec ki/2021)", Jurna	nit on %

8	ssbfnet.com Internet Source	1%
9	core.ac.uk Internet Source	1%
10	getlasso.co Internet Source	1%
11	Fakhira Meshara Salsabila, Ranti Fauza Mayana, Laina Rafianti. "Copyright Commercialization of Songs Uploaded in TikTok Application Without the Creator's Permission", Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2021	1%
12	Submitted to University of Melbourne Student Paper	1%
13	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	1%
14	e-journal.unair.ac.id Internet Source	1%
15	jurnal.untagsmg.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On Exclude bibliography On

# Law Enforcement In The Field Of Music In The Spotify Application

GRADEMARK REPORT	
FINAL GRADE	GENERAL COMMENTS
/0	Instructor
7 0	
PAGE 1	
PAGE 2	
PAGE 3	
PAGE 4	
PAGE 5	
PAGE 6	
PAGE 7	
PAGE 8	
PAGE 9	
PAGE 10	
PAGE 11	
PAGE 12	